Memahami Problem dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Oleh Nanang Nuryanta

Dosen FIAI UII Yogyakarta

Pendahuluan

Pendidikan Islam di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kerangka Sistem Pendidikan Nasional, karena posisinya sebagai sub-sistem pendidikan nasional. Menurut pengertiannya, pendidikan Islam yang ada di Indonesia dapat dipahami dalam dua bentuk. *Pertama*, pendidikan Islam sebagai proses pembelajaran dan *kedua*, pendidikan Islam sebagai kelembagaan.

Menurut Zuhairi, dkk. (1995:149), pendidikan Islam diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain, pendidikan (Islam) tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Dalam hal ini, bukan berarti formal saja, tetapi mencakup pula pendidikan dalam bentuk informal dan non formal. Dalam prakteknya, menurut Mochtar Buchori (1994:50) pendidikan Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yakni:

Pertama, Pendidikan Pondok Pesantren, yaitu pendidikan Islam yang diselenggarakan secara tradisional, bertolak dari pengajaran al-Qur'an dan Hadits, dan merancang segenap kegiatan pendidikannya untuk mengajarkan kepada para siswa Islam sebagai cara hidup, Islam sebagai *way of life*;

Kedua, Pendidikan Madrasah, yaitu pendidikan Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan model Barat, yang mempergunakan metode pengajaran klasikal, dan berusaha menanamkan Islam sebagai landasan hidup ke dalam diri para siswa;

Ketiga, Pendidikan Umum yang Bernafaskan Islam, yaitu pendidikan Islam yang dilakukan dengan cara mengembangkan suasana pendidikan yang bernafaskan Islam di lembaga-lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan yang bersifat umum, dan;

Keempat, Pelajaran Agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah saja.

Pendidikan di Pondok Pesantren dan Madrasah sangat jelas aspek ke-Islamannya. Namun untuk jenis pendidikan Islam ketiga sebagaimana dikemukakan di atas, untuk pendidikan tinggi dapat disebutkan antara lain seperti yang berlangsung di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar atau Universitas Islam Bandung (UNISBA) di Bandung. Sedangkan untuk pendidikan menengah dapat disebutkan seperti SMA Muhammadiyah atau SMA Islam lainnya. Sedangkan tingkat dasar

misalnya SD Al Azhar, Al-Irsyad, Al - Ma'arif dan lain sebagainya.

Sedangkan Kegiatan pendidikan agama Islam adalah merupakan salah satu jenis atau bentuk pengajaran pendidikan Islam yang sangat terbatas cakupannya, sehingga banyak yang mengartikan bahwa sebenarnya jenis ini tidak dapat dikatakan sebagai *kegiatan pendidikan Islam* dan lebih tepat disebut sebagai *kegiatan pengajaran saja*.

Bila dikaitkan dengan tuntutan perkembangan saat ini, yaitu abad 21 atau millineum ketiga, maka sebenarnya banyak persoalan yang dihadapi oleh pendidikan Islam di Indonesia. Untuk itulah dalam tulisan ini akan dibahas beberapa persoalan atau yang disebut dengan problem pendidikan Islam di Indonesia, kemudian strategi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan.

Problem Pendidikan Islam di Indonesia

Pada dasarnya, persoalan mendasar pendidikan Islam lebih kurang sama dengan persoalan pendidikan pada umumnya yaitu berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan masalah manajemen. Masalah ini tidak dapat dilepaskan dari adanya sejumlah tantangan yang sangat besar sudah sejak lama, apalagi ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik sejak tahun 1997 hingga kini. Di samping juga sejumlah tantangan globalisasi dan dorongan keras untuk mewujudkan masyarakat madani.

Menurut Santosa Hamiddjojo, (1998) dan dikutip oleh Kelompok Kerja Pengkajian Perumusan Filosofi,

Kebijakan dan Strategi Pendidikan Nasional (1999 :1-2), dirumuskan bahwa tantangan itu antara lain:

Pertama, krisis secara langsung menyebabkan GNP Indonesia hanya mencapai kurang dari \$ 380, sehingga menempatkan Indonesia menjadi negara terbelakang dengan jumlah orang miskin sekitar 80 juta. Secara empirik, krisis ini terjadi disebabkan oleh menurunnya nilai kurs rupiah terhadap valuta asing, namun secara substansial krisis ekonomi dan moneter ini diduga sebagai akibat sejumlah faktor, diantaranya: (1) akibat membudayanya sikap paternalisme yang berkonsekuensi terhadap sentralisme, (2) keterikatan dengan tradisi (orientasi ke belakang, baik sosial, moral maupun kultural), (3) adanya kecenderungan kondisi bangsa yang statis, (4) tidak adanya kejujuran intelektual (baik guru maupun dosen), (5) rendahnya ketelitian, ketekunan, dan kesabaran dalam mendidik anak, dan (6) rendahnya upaya mengejar keunggulan. Selain itu, krisis total merupakan salah satu akibat dari filosofi dan *platform* pendidikan nasional yang kurang kuat (sangat rentan), sehingga sistem pendidikan nasional tidak memiliki kemampuan yang handal dalam menghadapi dinamika perkembangan global.

Krisis yang bermula dari krisis ekonomi dan moneter setidaknya tidaknya berdampak kepada krisis sosial dan politik. Sementara itu krisis sosial dapat mengakibatkan krisis budaya dan moral, misalnya kondisi yang diindikasikan dengan kenakalan remaja, tawuran antar peserta didik, penjarahan, dan perampokan, serta krisis politik dapat berakibat pada krisis kepercayaan, misalnya demons-

trasi yang anarkhis, tindakan saling mengancam antar golongan dan partai bahkan menyangkut isu SARA dan disintegrasi bangsa. Dengan tidak disadari bangsa Indonesia secara berangsur-angsur menuju kepada krisis total. Kondisi krisis total sangat memungkinkan dapat mengakibatkan kemerosotan masyarakat, bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan.

Kedua, Indonesia dihadapkan pada tantangan global. era global menuntut kehadiran sumber daya manusia (SDM) yang handal yang memiliki keunggulan kompetitif. SDM yang dimaksudkan tidak hanya memiliki keunggulan di bidang akademik dan keterampilan teknis, melainkan jauh lebih penting adalah kompetensi keterampilan generik.

Ketiga, Indonesia melalui Reformasi pembangunan, di samping mengatasi krisis ekonomi, mewujudkan kedaulatan rakyat, dan menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam *usaha mewujudkan masyarakat madani*.

Selain permasalahan besar di atas, sebenarnya pendidikan Islam secara khusus juga mempunyai problem kalsik yang masih berlangsung sampai saat ini, yaitu mengenai kualitas Pendidikan Agama Islam. Menurut Ahmad Darmadji (1997:6; Muhammad Idrus: 1996:36) bahwa persoalan pendidikan Islam akan menyangkut tiga hal, yaitu *pertama*, institusi (kelembagaan), *kedua*, proses pendidikan yang disemangati ruh Islam dan *ketiga*, *subject matter*. Untuk

memadukan ketiga hal di atas sampai saat ini masih mengalami kendala yang besar. Pendidikan Islam belum mampu melaksanakan ketiga hal tersebut secara serempak dalam penyelenggaraan pendidikannya.

Pada satu sisi sebagaimana dikemukakan dalam pendahuluan di atas, pendidikan Islam sebagai contoh pesantren, telah berhasil melaksanakan tugas poin satu dan dua, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan dinaungi oleh ruh Islam. Tetapi dalam hal poin ketiga yaitu *subject matter* seringkali masih cenderung tertumpu pada ilmu-ilmu tertentu atau terbatas pada kitab-kitab kuning (atau lebih dominan ilmu agama), sedangkan ilmu umum masih sangat sedikit diberikan kepada para peserta didik.

Demikian pula sebaliknya, bahwa lembaga pendidikan umum yang sudah bernafaskan Islam sebagai contoh UII, telah berupaya memadukan ketiganya, tetapi kendalanya masih pada seputar proses pembelajaran subjek maternya. Bahkan secara empirik lembaga pendidikan Islam masih menjadi pilihan kedua atau *second choice* oleh sebagian masyarakat Indonesia yang nota bene mayoritas beragama Islam dan mengaku sebagai muslim; setidaknya untuk tingkat SLTP dan SLTA dalam jenjang pendidikan menengah. Tidak jarang masyarakat muslim yang rela menyekolahkan putra-putrinya di lembaga pendidikan non Islam (Kristen, sebagai contoh), hanya demi mengejar kualitas akademiknya tanpa mempertimbangkan kualitas pendidikan agamanya. Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa Islam bisa dipelajari di luar kelas dari buku, perpustakaan, dan

literatur-literatur tertentu.

Kondisi tersebut acapkali dikaitkan dengan masalah lainnya, yaitu relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Pendidikan Islam masih belum cukup mampu dalam memberikan lapangan kerja yang memadai bagi para out putnya dalam realitas kehidupan nyata. Suatu bukti bahwa bangsa Indonesia masih belum siap untuk bersaing dalam dunia global yang dapat dilihat dari kemampuan daya saing sumber daya manusianya. Boediono (1997:82) dalam Suyanto dan Hisyam (2000:3) menyatakan bahwa berbicara kemampuan sebagai bangsa, tampaknya kita belum siap benar menghadapi persaingan pada milenium ketiga. Tenaga ahli kita belum cukup memadai untuk bersaing di tingkat global.

Menurut Boediono, dilihat dari pendidikannya, angkatan kerja kita saat ini sungguh memprihatinkan. Sebagian besar angkatan kerja (53%) tidak berpendidikan. Mereka yang berpendidikan dasar sebanyak 34%, berpendidikan menengah 11%, dan yang berpendidikan tinggi (universitas) hanya 2%. Padahal tuntutan dari dunia kerja pada akhir pembangunan pada jangka panjang II nanti mengharuskan angkatan kerja kita berpendidikan. Dari angkatan kerja yang ada hanya 11% saja yang tidak berpendidikan; 52% berpendidikan dasar; 32% berpendidikan menengah; dan 5% dari angkatan kerja harus telah berpendidikan universitas.

Selain itu, masalah lain yang juga menjadi problem serius pendidikan Islam adalah masalah manajemen pendidikannya. Manajemen pendidikan yang dilakukan sekarang

cenderung bersifat sentralisasi dari pada desentralisasi, baik yang menyangkut pembiayaan maupun pengelolaannya. Seringkali masalah pembiayaan menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Sebagai kasus nyata, dalam kerangka pembiayaan pendidikan Islam adalah bahwa biaya satu IKIP (sekarang sudah menjadi Universitas) sama dengan seluruh biaya untuk IAIN se Indonesia. Ini benar-benar sangat memprihatinkan bagi penyelenggaraan pendidikan Islam. Untuk itulah, beberapa kebijakan pendidikan Islam perlu ditempuh agar pendidikan Islam mempunyai kontribusi yang berarti dalam kerangka pendidikan Nasional.

Strategi Pengembangan Kebijakan

Untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul di atas maka beberapa kebijakan yang dapat diambil dalam rangka pemberdayaan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tuntutan kualitas manusia abad ke-21. Pendidikan harus melaju pada pembentukan manusia yang handal, yang tidak hanya memiliki kualitas akademik tetapi juga memiliki kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT sehingga mempunyai sumbangan yang berarti bagi perwujudan masyarakat madani. Agar kebijakan pendidikan Islam dapat dilaksanakan dengan tepat, maka pendidikan Islam harus mampu melihat kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi pada abad ke-21. Menurut Ahmad Tafsir (1999 : 5), kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi yang sekaligus menjadi karakteristik pada abad ke-21. Kecenderungan-kecenderungan tersebut adalah:

Pertama, kita akan memasuki pasar bebas. Ini berarti akan terjadi suatu interaksi antar negara dalam investasi, bisnis barang maupun jasa. Masyarakat Indonesia akan membuka diri bagi interaksi dengan bangsa-bangsa lain. Interaksi itu menuntut bangsa Indonesia mampu bersaing. Untuk itu diperlukan kemandirian, kerja keras serta etos kerja yang tinggi dengan sifat tahan uji bahkan tahan bantingan. Mengharapkan proteksi, dari mana pun, akan sia-sia. Pasar bebas itu tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi tetapi juga berpengaruh pada aspek-aspek lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung.

Kedua, tuntutan otonomi daerah akan semakin gencar dan relevan. Pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah menghasilkan antara lain peningkatan kemampuan bangsa Indonesia. Tingkat pendidikan semakin tinggi, rasa percaya diri juga semakin tinggi. Hal itu akan menimbulkan keinginan untuk menuntut otonomi semakin luas. Sementara tuntutan otonomi itu tidak akan melemahkan rasa kebangsaan, maupun persatuan, tuntutan itu justru semakin relevan. Akibatnya, pendidikan juga akan semakin beralih dari sentralisasi ke desentralisasi.

Ketiga, masyarakat kita akan menjadi masyarakat madani. Masyarakat madani (*civil society*) ialah masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab (Tilaar: 1999 : 109). Inilah masyarakat yang akan berkembang dari rakyat untuk rakyat. Masyarakat madani seperti itu adalah masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi, masyarakat yang berdisiplin tinggi juga merupakan ciri masyarakat

industri. Masyarakat industri adalah masyarakat yang serba teratur, masyarakat yang cerdas, yang *well informed*. (hidup dalam masyarakat informasi). Dengan demikian masyarakat madani itu adalah masyarakat yang menguasai sumber-sumber informasi baik politik, hukum, teknologi, seni maupun agama. Masyarakat madani adalah masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dan hidup dalam alam demokrasi.

Keempat, pada masa datang, peran swasta akan semakin besar. Ini berkaitan dengan semakin cerdasnya penduduk dan semakin tingginya kesadaran akan tanggungjawab. Semakin tingginya rasa percaya diri pada masyarakat juga akan menyebabkan peran swasta semakin besar. Ini bukan berarti peran pemerintah akan hilang. Pemerintah masih berperan terutama dalam mengarahkan masyarakat besar Indonesia. Ini merupakan wujud masyarakat madani.

Kelima, telah terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat, terutama dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan itu akan menimbulkan goncangan, menyebabkan depresi relatif, dislokasi, disorientasi dan negativisme.

Depresi relatif yaitu perasaan teringkari, tersisihkan atau tertinggal dari orang lain dan kalangan tertentu dalam masyarakat akibat tidak dapat mengikuti perubahan dan kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan itu.

Dislokasi maksudnya ialah perasaan tidak punya tempat dalam tatanan sosial yang sedang berkembang. Dalam wujudnya yang

nyata dislokasi itu dapat dilihat pada krisis-krisis yang dialami kaum marginal atau pinggiran di kota-kota besar akibat urbanisasi.

Disorientasi ialah perasaan tidak mempunyai pegangan hidup akibat dari apa yang ada selama ini tidak dapat lagi dipertahankan karena terasa tidak cocok dan kehilangan identitas. Sedangkan yang dimaksud *negativisme* ialah perasaan yang mendorong kearah pandangan yang serba negatif kepada susunan yang mapan, dengan sikap-sikap tidak percaya, curiga, bermusuhan, melawan dan sebagainya.

Jika gejala-gejala yang diakibatkan perubahan mendadak itu tidak diantisipasi dengan baik, maka ia akan menjadi lahan subur bagi tumbuhnya gejala-gejala radikalisme, fanatisme, sektarianisme, fundamentalisme, sekularisme dan lain-lain yang serba negatif.

Dengan kecermatan melihat adanya tantangan dan peluang yang ada tersebut, maka paling tidak kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia diarahkan pada:

(1) *Peningkatan kualitas pendidikan Islam itu sendiri.* Pendidikan Islam harus mampu memperbaiki kualitas manajemen pendidikannya yaitu beralih dari sistem sentralisasi kearah desentralisasi. Di samping itu perlu juga diupayakan peningkatan kualitas belajar mengajar serta proses penyelenggaraan pendidikan, termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas pendidik dan peserta didiknya serta tenaga administrasi kependidikannya kearah profesionalisme dan kemandirian.

Dalam kaitannya dengan kualitas materi pendidikan, perlu diupayakan perbaikan kurikulum pendidikan agamanya, di samping pendidikan pada umumnya. Muatan kurikulum lokal yang dapat mendorong adanya kemampuan keahlian khusus, minimal bahasa sebagai alat komunikasi harus ditingkatkan, sehingga dengan bekal bahasa yang baik para pendidik dan peserta didik dapat memperoleh sekaligus mengembangkan ilmu dengan baik. Selain itu proporsi antara pendidikan umum dan pendidikan agama juga harus dibuat secara proporsional, mungkin dapat 50% : 50% atau yang penting integrasi antara keduanya tersebut yang paling perlu untuk dikembangkan.

Dalam kegiatan pendidikan Islam ruh Islamnya harus menjadi penentu bagi setiap aktifitas pendidikan yang dilakukan. Dalam hal ini, penekanan aspek moralitas, afektif harus bisa ditonjolkan dan bukan hanya aspek kognitif dan psikomotoriknya saja.

(2) *Relevansi Pendidikan Islam dengan Tuntutan Masyarakat atau Stakeholder.* Dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan upaya yang dapat ditempuh antara lain dengan pembekalan kepada para peserta didik untuk dapat menguasai ilmu dan teknologi dengan sebaik-baiknya dan didukung oleh mentalitas keagamaan yang tinggi. Upaya ini harus didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang dapat

bersaing sehingga kualifikasi yang diperlukan oleh masyarakat dan dunia kerja dapat dipenuhi.

- (3) *Pendidikan Islam harus Mampu Melahirkan Profil Religius.* Dalam al-Qur'an, disebutkan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah agar beribadah kepadaNya (Q.S. 51:56). Untuk itu tujuan pendidikan Islam juga mengacu pada tujuan manusia diciptakan dan dengan demikian, pendidikan Islam harus melahirkan insan-insan yang senantiasa taat kepada Khalik-nya. Berdasarkan hal tersebut, maka paradigma yang harus dibangun oleh pendidikan Islam adalah *Tauhid Paradigm* atau paradigma tauhid. Pendidikan Islam harus dapat mendidik dan mengajarkan kepada setiap peserta didik agar menjadi manusia religius. Al-Qur'an menyebutkan bahwa sejak manusia ditiupkan ruh pertama kali oleh Allah sebenarnya telah menyatakan ketauhidan tersebut. "*Bukankah Aku ini Tuhamu ?*", *Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Q.S.:7:172) demikian juga dalam Q.S. 30:30.*

Dengan demikian pendidikan Islam harus melahirkan SDM yang religius, karena dari person yang religius ini maka akan terlahirlah masyarakat yang religius yang akan memunculkan peradaban yang religius pula. Profil yang mempunyai kekuatan spiritual-religius inilah yang akan sanggup menghadapi tantangan zaman modern yang serba canggih dan dan tidak sedikit yang memunculkan perubahan masyarakat modern yang jauh dari nuansa

ketuhanan dan cenderung mendewadewakan akal pikiran dan kebebasan yang yang tidak berperadaban.

Kualifikasi religiusitas harus didukung pula dengan kualitas intelektual yang memadai, sehingga tidak hanya dipandang sebagai "ahli ibadah yang kolot tanpa memikirkan kualitas pengetahuan". Menurut Johar MS dalam "Religiusitas Iptek" yang diterbitkan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga (1998 : 31), kualifikasi profil yang religius adalah seseorang yang melek ilmu, memiliki cara berfikir yang baik, memiliki motivasi positif, dan menampilkan tindakan yang konstruktif.

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapatlah disimpulkan bahwa pendidikan Islam dapat dipahami dalam bentuk sebagai proses pembelajaran dan sebagai kelembagaan. Karena pendidikan Islam di Indonesia dihadapkan pada permasalahan mutu dan masalah manajemen sebagai problem pokoknya maka kebijakan pendidikan paling tidak harus :

1. Ditingkatkan mutunya, terutama berkaitan dengan kualitas SDM, kurikulum, sistem penyelenggaraannya yang bersifat desentralisasi serta memunculkan ke arah profesionalisme.
2. Relevansi pendidikan dengan tuntutan masyarakat atau *stakeholder* dan pendidikan Islam harus siap bersaing dalam hal melahirkan kualitas lulusan atau outputnya.
3. Pendidikan Islam harus dapat melahirkan profil religius yang bercirikan sebagai profil individu yang melek ilmu, memiliki cara

berfikir yang baik, memiliki motivasi positif, dan menampilkan tindakan yang konstruktif.***

Kepustakaan

Buchori, Muchtar, 1994, *Penelitian Pendidikan Dan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, IKIP Muhammadiyah Jakarta Press

Darmadji, Ahmad, 1997, *Jurnal Pendidikan Islam Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah

Depag RI, 1995, *Al-quran dan Terjemahnya*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Depag RI

Depdikbud RI, 1999, *Kelompok Kerja Pengkajian Perumusan Filosofi, Kebijakan dan Strategi Pendidikan Nasional*

Mulkhan, Abdul Munir, dkk; 1998, *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren Religiusitas Iptek*, Yogya-karta, Kerjasama Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga dengan Pustaka Pelajar.

Suyanto, dan Hisyam, Jihad (2000). *Refleksi Dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia Mmemasuki Milenium III*, Yogyakarta, Penerbit Adicita Karya Nusa.

Tafsir, Ahmad, 1999, *Pendidikan Untuk Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Luar Biasa Ilmu Pendidikan Islam pada IAI. Lathifah Mubarakiyah Pondok Pesantren Suryalaya, tanggal 5 September 1999

Tilaaar, H. A. R, 1999, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Persepektif Abad 21*, Magelang, Tera Indonesia